PERSPEKTIF

Available online <http://ojs.uma.ac.id/index.php/perspektif>

Analisis Sosialisasi Politik Relawan Demokrasi Basis Warga Internet Kota Medan Pemilihan Umum Tahun 2019

Analysis of Political Socialization of Democracy Volunteers Base on Medan Internet Residents in 2019 General Election

Mas Indra Putra Alamsyah*, M.Arif Nasution & R. Hamdani Harahap
Magister Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sumatera Utara,
Indonesia

Diterima: 21 Juni 2020; Disetujui: 07 Desember 2020; Dipublish: 31 Januari 2021

Abstrak

Relawan Demokrasi Basis Netizen merupakan salah satu kelompok masyarakat yang melaksanakan kegiatan sosialisasi Pemilu dan edukasi nilai-nilai demokrasi kepada segmen masyarakatnya atau Netizen pada Pemilu 2019. Penelitian ini membahas tentang kegiatan sosialisasi Pemilu yang dilakukan oleh Relawan Demokrasi Basis Netizen. Tujuan Penelitian ini adalah untuk menganalisis pola-pola sosialisasi Pemilu dengan menggunakan variabel sosialisasi politik. Penulis menggunakan metode kualitatif, pengumpulan data melalui wawancara, dokumentasi dan studi literasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Relawan Demokrasi Basis Netizen melakukan kegiatan sosialisasi Pemilu dengan menggunakan sarana media dan non media melalui postingan-postingan *account* relawan dan *account* pribadi. Ada empat pola sosialisasi Relawan Demokrasi Basis Netizen yakni : Membuka posko informasi, kongkow bareng Netizen, postingan media sosial dan *giveaway*. Bagi sebagian masyarakat khususnya kaum Millennial menganggap kegiatan sosialisasi Pemilu sebagai upaya representasi perjuangan menegakkan kedaulatan rakyat hal ini disokong oleh komposisi Relawan Demokrasi Basis Netizen yang seluruhnya adalah mahasiswa yang dinilai jauh dari kepentingan-kepentingan politik, hal ini karena Millennial lebih familiar dengan media sosial sehingga mudah dan cepat mengikuti perkembangan informasi dan relatif banyak mengantongi referensi. Sedangkan sebagian lagi yang menolak beranggapan bahwa kegiatan sosialisasi yang dilakukan relawan merupakan kegiatan kurang kerjaan bahkan ada juga yang sampai mencemooh relawan

Kata Kunci: Pemilihan Umum 2019; Relawan Demokrasi Basis Netizen

Abstract

Netizen Basis Democracy Volunteers are one of the community groups that carry out election socialization activities and educate democratic values to their segments of society or Netizens in the 2019 Elections. This study discusses the election socialization activities carried out by Netizen Basis Democracy Volunteers. The purpose of this research is to analyze the patterns of election socialization using the variable of political socialization. The author uses qualitative methods, data collection through interviews, documentation and literacy studies. The results showed that Netizen-Based Democracy Volunteers carry out election socialization activities using media and non-media facilities through volunteer and personal account posts. There are four patterns of socialization of Netizen-Based Democracy Volunteers, namely: Opening information posts, hanging out with Netizens, posting on social media and giveaway. For some people, especially Millennials, consider the Election socialization activity as an effort to represent the struggle to uphold people's sovereignty, this is supported by the composition of Netizen-Based Democracy Volunteers who are all students who are considered far from political interests, this is because Millennial is more familiar with social media so that it is easy and quickly keep abreast of information and relatively many have references. While some who refuse to assume that the socialization activities carried out by volunteers are less work activities and some even make fun of volunteers.

Keywords: 2019 General Election; Netizen Base Democracy Volunteers

How to Cite: Alamsyah, M.I.P., Nasution, M.A., & Harahap, R.H. (2021). Analisis Sosialisasi Politik Relawan Demokrasi Basis Warga Internet Kota Medan Pemilihan Umum Tahun 2019. *PERSPEKTIF* 10 (2):65-75.

*Corresponding author:
E-mail: keroncongjadul@gmail.com

ISSN 2085-0328 (Print)
ISSN 2541-5913 (online)

PENDAHULUAN

Pemilihan Umum atau yang lazim disebut dengan Pemilu merupakan salah satu indikator untuk mengukur tingkat demokrasi pada sebuah negara (Rahmatunnisa, 2017). Demokrasi di Indonesia sepenuhnya ditentukan oleh rakyat sesuai dengan Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang menyebutkan bahwa rakyatlah yang mempunyai kekuasaan tertinggi bukan Presiden, agama atau kelompok tertentu (Triwahyuningsih, 2019). Dengan Pemilu maka terpilihlah pemerintahan yang baru secara sah sesuai dengan konstitusi, karena telah mendapatkan legitimasi dari rakyat.

Ada tiga tujuan dari pelaksanaan Pemilu yang dikemukakan oleh Prihatmoko (2003) yakni: (1) Pemilu bertujuan untuk menyeleksi para pemimpin pemerintahan dan kebijakan umum (*public policy*). (2) Pemilu sebagai pemindahan konflik kepentingan dari rakyat kepada lembaga perwakilan rakyat melalui wakil wakil yang terpilih atau partai yang memenangkan kursi. (3) Pemilu sebagai sarana penggerak atau penggalangan dukungan dari rakyat untuk negara dengan cara berpartisipasi mencoblos di Tempat Pemungutan Suara (TPS) (Prihatmoko, 2003).

Indonesia salah satu negara demokrasi terbesar di dunia setidaknya telah menyelenggarakan lima kali pelaksanaan Pemilu paska lengsernya rezim Orde Baru (Orba) yakni pada Tahun 1999, 2004, 2009, 2014, dan yang terakhir pada Tahun 2019 yang banyak mengalami perubahan menjadi lebih bebas, jujur, adil dan transparan.

Sedikit *flashback* ke masa lalu, pada awalnya Pemilu di Indonesia dilaksanakan dengan menggunakan sistem tertutup dimana Partai Politik (Parpol) dengan mekanismenya memilih orang-orang tertentu untuk didudukkan sebagai eksekutif dan legislatif, sistem ini berlaku sejak Tahun 1955 sampai 1999. Namun

pada Tahun 2004 sistem Pemilu berubah menjadi ke sistem terbuka dimana rakyat memilih secara langsung dan bebas tanpa perantara Parpol.

Pelaksanaan Pemilu di era reformasi dilaksanakan dengan dua tahap yang memisahkan antara pemilihan Legislatif (Pileg) dan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres). Namun pada Pemilu Tahun 2019 dilaksanakan secara serentak sebagai konsekuensi dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang pengujian Undang-Undang Nomor 42 tahun 2008 yang diajukan oleh Effendi Ghazali dan Koalisi masyarakat untuk Pemilu (Putusan MK, No. 14, 2013).

Pemilu serentak 2019 terbilang Pemilu yang rumit karena dilaksanakan secara serentak yang menggabungkan dua pemilihan sekaligus yakni Pileg dan Pilpres dalam satu waktu yang tentu memerlukan kesiapan ekstra dibandingkan pada Pemilu sebelumnya, mulai dari tahapan persiapan, pelaksanaan hingga paska pemilihan. Persiapan logistik contohnya, dimana terdapat lima jenis kertas suara yang membutuhkan ketelitian untuk membedakan baik bagi penyelenggara Pemilu terlebih bagi masyarakat sebagai pemilih karena jika tidak, bisa dipastikan akan terjadi kekeliruan dalam memilah dan memilih surat suara. Lima jenis surat suara masing-masing dibedakan berdasarkan warnanya, Abu-abu untuk pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Kuning untuk pemilihan anggota DPR-RI, Merah untuk pemilihan anggota DPD-RI, Biru untuk pemilihan Anggota DPRD Provinsi, dan Hijau untuk pemilihan anggota DPRD Kabupaten/Kota (Keputusan KPU RI No.1944, 2018).

Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilu 2019 juga mengalami kenaikan mencapai 190.770.329 (kpu.go.id) jika dibandingkan dengan Pemilu 2014 hanya sebesar 185.822.507 (Pileg) dan 188.268.423 (Pilpres). Biaya pelaksanaan Pemilu juga mengalami kenaikan mencapai 25,59 triliun (setkab,

2019) naik 61 persen jika dibandingkan dengan Pemilu 2014 yang hanya mencapai 15,62 triliun. Berapa pun biaya pelaksanaan agenda demokrasi tersebut seyogyanya juga sejalan beriringan dengan peningkatan kesejahteraan rakyat Indonesia.

KPU Kota Medan selaku penyelenggara Pemilu 2019 di tingkat Kabupaten/Kota telah menetapkan sebanyak 729 calon anggota legislatif dalam Daftar Calon Tetap (DCT) yang terdiri dari 475 laki-laki dan 254 perempuan yang akan memperebutkan 50 kursi empuk wakil rakyat yang tersebar di lima Daerah Pemilihan (Dapil). Adapun jumlah kuota perempuan mencapai 34 persen dari total DCT (Medanbisnisdaily, 2018).

Pelaksanaan Pemilu selalu diharapkan berjalan dengan lancar, hal ini dapat ditandai dengan meningkatnya jumlah partisipasi dan kualitas pemilih karena angka partisipasi mempunyai relevansi dengan kualitas Pemilu (Sucipto, 2019). Untuk itu KPU sejak Pemilu 2014 yang lalu telah *melaunching* satu program yang bernama Relawan Demokrasi.

Relawan Demokrasi merupakan program yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih pada Pemilu. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 yang menegaskan bahwa pentingnya peran partisipasi masyarakat dalam setiap kegiatan Pemilu dan menjadi salah satu indikator yang tak terpisahkan. Program ini dinilai sebagai salah satu terobosan penting dalam menggenjot angka partisipasi dan menekan angka Golongan Putih (Golput) di Indonesia yang dipengaruhi salah satunya oleh minimnya sosialisasi Pemilu (Saban & Wijaya, 2018) serta faktor sosial politik lainnya.

Relawan Demokrasi merupakan suatu program yang melibatkan masyarakat seluas-luasnya yang nantinya dijadikan sebagai *pioneer* untuk membantu KPU dalam memperluas upaya sosialisasi

agenda dan informasi kePemiluan sekaligus dalam hal edukasi nilai-nilai demokrasi di tengah-tengah masyarakat. Ketua KPU melalui surat Nomor 32 Tahun 2019 memerintahkan KPU Kabupaten/Kota seluruh Indonesia untuk mengadakan rekrutmen terhadap Relawan Demokrasi yang berjumlah 55 orang yang tersebar di 11 basis pemilih yakni : Basis Keluarga, Basis Pemilih Pemula, Basis Pemilih Pemula, Basis Pemilih Perempuan, Basis Pemilih Disabilitas, Basis Pemilih Berkebutuhan Khusus, basis Pemilih Marjinal, Basis Komunitas, Basis Keagamaan, Basis Demokrasi dan Basis Masyarakat Internet (Netizen). Pada tulisan ini penulis memfokuskan pembahasan pada Relawan Demokrasi Basis Netizen Kota Medan yang melakukan sosialisasi politik pada Pemilu 2019 yang beranggotakan Gadis Anatasia (ketua), Magdalena Silitonga, Aisyah Aulia Putri, Cindy Vebyola Batubara, Irfan Anas.

Dalam melaksanakan tugasnya sebagai penyuluh Pemilu, Relawan Demokrasi Basis Netizen tentu mempunyai mekanisme atau pola-pola tertentu agar materi-materi sosialisasi dapat tersampaikan secara baik dan lengkap sehingga tujuan sosialisasi dapat tercapai hal ini sangat dipengaruhi diantaranya oleh kualitas individu maupun kelompok (Gunawan, Pati & Sampe, 2019). Sosialisasi Pemilu yang merupakan bagian dari sosialisasi politik mempunyai dua asal kata yakni sosialisasi dan politik, sosialisasi ditinjau dari perspektif sosiologis bermakna sebagai proses transfer nilai, pengetahuan ataupun ketrampilan dari individu ke individu lain sedangkan kata politik lazim dimaknai sebagai suatu seni atau ilmu untuk meraih kekuasaan.

Levine dalam (Haryanto, 2018) menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan sosialisasi politik adalah suatu proses pembelajaran kehidupan politik yang membentuk suatu budaya politik yang dalam pilihannya menuju pelestarian

atau perubahan (Haryanto, 2018) Sosialisasi politik yang dimaksud dalam tulisan ini adalah proses pembelajaran dalam kegiatan transfer informasi kePemiluan dan edukasi nilai-nilai demokrasi yang dilakukan oleh Relawan Demokrasi Basis Netizen kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih pada Pemilu serentak Tahun 2019. Langton membagi membagi sosialisasi politik dalam empat elemen yakni : 1. Agen atau pelaku yang melakukan sosialisasi, 2. Materi sosialisasi yang disampaikan, 3. Interaksi yang terjadi antara pelaku dan sasaran sosialisasi , 4. prilaku yang dihasilkan akibat dari kegiatan sosialisasi (Langton, 1969).

Gambar 1. Pola Analisis

Penulis menilai teori atau konsep diatas sangat tepat untuk melihat dan menganalisis bagaimana pola sosialisasi politik yang dilakukan oleh Relawan Demokrasi Basis Netizen Kota Medan pada Pemilu Serentak Tahun 2019.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang mendeskripsikan suatu fenomena sosial melalui bahasa dan kata-kata dengan menggunakan metode-metode yang ilmiah (Moleong, 2012). Berdasarkan pengertian

tersebut maka dalam tulisan ini penulis bermaksud untuk menjelaskan dan menggambarkan secara mendalam terkait pola-pola sosialisasi politik yang dilakukan Relawan Demokrasi Basis Netizen Kota Medan pada Pemilu Serentak Tahun 2019. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, studi dokumen dan studi literasi.

Untuk menganalisis data yang diperoleh, penulis berpedoman kepada teknik analisis data Miles dan Huberman yang terdiri dari empat tingkatan yakni: Pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan pengambilan kesimpulan (Moleong, 2012).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Partisipasi masyarakat merupakan salah satu indikator keberhasilan dari pelaksanaan agenda demokrasi, minimnya partisipasi masyarakat maka akan mereduksi legalitas pelaksanaan Pemilu karena ketidakpedulian atau sikap Golput masyarakat. Jika dilihat secara politis penyebabnya adalah : (1) Tidak adanya Parpol yang dapat dipercaya, (2) Pemilu tidak memunculkan figur kandidat kredibel, (3) Pemilu tidak membawa masyarakat pada perubahan atau perbaikan, (4) Cap (stigma) politik yang kotor, (5) Prilaku elit yang spekulatif (habis manis sepah dibuang) di saat musim Pemilu, (6) Menguatnya politik pragmatis (Arianto, 2011).

Relawan Demokrasi Basis Netizen merupakan salah satu instrument KPU dalam mensosialisasikan agenda dan informasi kePemiluan serta penanaman nilai-nilai demokrasi di tengah-tengah masyarakat di media internet yang saat ini banyak mengalami distorsi informasi akibat dari konstruksi berita dan kuantitas respon Netizen (Adhilarso, Utari & Hastjarjo, 2018). Dalam melaksanakan sosialisasi, Relawan Demokrasi dituntut bersikap profesional dan independen serta menjunjung tinggi kode etik yang telah ditetapkan yaitu : (1) Bersikap netral, (2)

Bersikap santun dan baik, (3) Menghormati kearifan lokal, (4) Tidak diskriminatif atau berpihak, (5) Tidak menerima gratifikasi dari pihak manapun (KPU, 2019).

Relawan Demokrasi Basis Netizen sebagai Agen

Dalam kegiatan sosialisasi Pemilu 2019, Relawan Demokrasi Basis Netizen diidentifikasi sebagai agen atau pelaku sosialisasi, keberadaan Relawan Demokrasi di Pemilu 2019 tidak bisa lepas dari proses sosialisasi, hal ini karena Relawan Demokrasi mempunyai tugas utama sebagai sosialisator atau penyuluh Pemilu, lain halnya dengan keberadaan panitia AdHock yaitu Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang berperan sebagai penyelenggara Pemilu tambahan yang sifatnya *conditional* namun juga sama-sama dibentuk oleh KPU.

Relawan Demokrasi Basis Netizen seluruhnya masih berstatus sebagai mahasiswa, empat diantaranya mahasiswa S1 dan satu lainnya adalah mahasiswa S2. Dilihat dari statusnya, Relawan Demokrasi Basis Netizen mempunyai pendidikan yang cukup tinggi dan dinilai mampu menyerap serta mentransfer materi-materi sosialisasi. Kemampuan komunikasi juga sangat berpengaruh dalam proses sosialisasi dalam menghadapi bentuk-bentuk komunikasi Netizen di media sosial saat ini yang dinilai mempunyai masalah etika komunikasi sehingga tak jarang berakhir di meja hukum (Astuti, 2016).

Netizen sebagai target sosialisasi pada umumnya adalah pengguna aktif internet yang diartikan sebagai masyarakat yang kesehariannya memanfaatkan internet sebagai bagian dari aktivitas kehidupannya baik itu berfungsi sebagai sarana informasi, hiburan dan komunikasi. Netizen saat ini didominasi kaum Millenial atau kaum muda yang berusia 16-30 tahun (UU

Kepemudaan, 2009). Menurut data BPS, jumlah penduduk Indonesia yang berusia 15-29 tahun pada akhir Februari 2019 mencapai 37.823.164 jiwa (BPS, 2016) sedangkan data penduduk Kota Medan pada akhir Desember 2018 dengan angka perbandingan yang sama mencapai 668.545 jiwa (BPS Kota Medan, 2019)

Kaum Millenial sebagai bagian dari Netizen adalah kelompok masyarakat yang menggunakan media sosial dengan berbagai platfom antara lain *Facebook, Twitter, Instagram, Youtube* dan *WhatsUp*. Data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) Tahun 2018 menunjukkan bahwa jumlah pengguna internet mencapai 171,17 juta jiwa atau mencapai 64,8 persen dari total populasi penduduk Indonesia yang mencapai 264,16 juta jiwa (APJII, 2018). Angka ini mengalami peningkatan jika dibandingkan hasil data survei pada tahun sebelumnya yang mencapai 143,26 juta jiwa. Melihat dinamika sosial tersebut, maka langkah KPU dinilai sangat tepat dengan membentuk satu segmen yang beroperasi khusus di rimba mayantara guna memaksimalkan upaya sosialisasi pada Pemilu 2019.

Di era digital saat ini, arus informasi mengalir begitu deras, Netizen sebagai target segmen Relawan Demokrasi yang jumlahnya sangat banyak harus mendapatkan informasi kePemiluan yang benar dan jelas melalui saluran yang resmi agar tidak menjadi korban hoak atau disinformasi. Perkembangan media sosial saat ini telah menciptakan polarisasi yang membelah masyarakat menjadi dua kelompok yakni konservatif dan liberal, masing-masing kelompok mempunyai orientasi pada setiap wacana yang diproduksinya (Syahputra, 2017). Media sosial sejatinya dapat berperan positif salah satunya yaitu menjadi sarana sosialisasi politik baru karena konten maupun pola komunikasi yang dilakukan cenderung lebih sesuai dengan kondisi Netizen saat ini, selain itu, media sosial

juga dapat menjadi wadah aspirasi dalam memperlebar ruang partisipasi politik masyarakat serta referensi utama dalam memilih.

Sebagai agen, keberadaan Relawan Demokrasi Basis Netizen dinilai sangat krusial guna membantu KPU dalam memperluas jangkauan sosialisasi dimana tantangan pada Pemilu 2019 dinilai sangat berat, hal ini merupakan konsekuensi logis dari Pemilu 2019 yang dilaksanakan secara serentak dimana melibatkan dua pemilihan yakni Pilpres dan Pileg dengan lima surat suara sekaligus yang pastinya jika tidak dilakukan upaya sosialisasi yang gencar dan *massive* maka akan menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat. Disinilah dituntut peran maksimal Relawan Demokrasi Basis Netizen dalam pemahaman dan penguasaan informasi kePemiluan, oleh karena itu, KPU Kota Medan selaku pihak yang merekrut para relawan sebelumnya telah membekali para relawan dalam beberapa kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) guna menambah pengetahuan dan wawasan yang nantinya akan disosialisasikan atau *dishare* ke masyarakat luas.

Selain pengetahuan dan wawasan kePemiluan dan demokrasi, KPU Kota Medan juga membekali Relawan Demokrasi Basis Netizen dengan sejumlah peraturan dan kode etik yang harus dijaga agar kemurnian dari kegiatan sosialisasi jauh dari dugaan-dugaan negatif yang akan merusak citra lembaga KPU sebagai penyelenggara Pemilu. Hal ini tentu mempunyai dasar jika disandingkan dengan dinamika sosial politik terkini dimana pada Pemilu 2019 banyak pihak-pihak yang tak bertanggung jawab mengasosiasikan KPU berada pada posisi tidak netral atau berat sebelah ke pihak *incumbent*, guna menepis hal-hal tersebut maka Relawan Demokrasi Basis Netizen harus benar-benar menjalankan perannya sebagai agen atau penyuluh Pemilu bukan

sebagai Tim Sukses (Timses) dari kandidat atau Partai Politik (Parpol) tertentu.

Relawan Demokrasi Basis Netizen melakukan sosialisasi informasi kePemiluan dan edukasi demokrasi kepada masyarakat baik secara langsung maupun melalui media, hal tersebut dilakukan agar pesan atau materi sosialisasi dapat tersampaikan secara baik dan menyeluruh seperti membuat semacam kegiatan *social experiment*, *Focus Group Discussion* (FGD), membuka posko Pemilu dan sebagainya di beberapa tempat seputaran kota Medan. Berbagai rangkaian kegiatan sosialisasi yang dilakukan Relawan Demokrasi Basis Netizen menjadi perhatian khusus dan penuh kehati-hatian karena Relawan Demokrasi Basis Netizen menyadari sepenuhnya bahwa kegiatan sosialisasi tersebut harus benar-benar bebas dari kepentingan apapun dan harus sesuai dengan prinsip penyelenggara Pemilu yang termaktub dalam Pasal 3 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yaitu : mandiri, jujur, adil, terbuka, profesional serta selalu menjaga independensi dan kode etik relawan.

Materi Sosialisasi

Dalam tulisan ini, materi dimaknai sebagai bahan pelajaran yang berisikan tentang berbagai informasi Pemilu secara luas dan nilai-nilai demokrasi yang di ajarkan melalui pendekatan sosialisasi masyarakat non formal yang mempunyai orientasi untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi memilih serta pencerdasan intelektual akan nilai-nilai demokrasi yang sesuai dengan tujuan dibentuknya program Relawan Demokrasi. Konsep materi harus disesuaikan dengan kondisi masyarakat agar proses sosialisasi semakin baik karena berimplikasi terhadap kadar minat pemilih nantinya (Samosir, 2015).

Relawan Demokrasi Basis Netizen dalam kegiatan sosialisasinya melakukan pendidikan kePemiluan kepada masyarakat dengan menggunakan sarana

media sosial atau internet melalui postingan-postingan yang meliputi tahapan-tahapan Pemilu mulai dari persiapan, pemungutan dan perhitungan suara hingga penetapan hasil. Di tiap-tiap tahapan juga diajarkan tentang berbagai mekanisme teknis pelaksanaan yang meliputi pendaftaran pemilih, undangan pemilih, mengenal jenis-jenis surat suara, tata cara melipat surat suara hingga tata cara mencoblos surat suara yang benar. Relawan Demokrasi Basis Netizen memaparkannya secara detail dan jelas agar masyarakat tidak keliru saat mencoblos yang dapat mengakibatkan surat suara menjadi tidak sah.

Selain itu Relawan Demokrasi Basis Netizen juga melakukan pendidikan demokrasi yang meliputi pengenalan nilai-nilai demokrasi dalam pelaksanaan Pemilu, yang ingin dicapai adalah terbentuknya paradigma masyarakat atas Pemilu yang berkualitas yakni dengan menggunakan hak pilihnya yang dilandasi oleh rasa sadar, sukarela dan rasional. Hal ini dipandang sangat penting agar masyarakat tidak terjebak dalam pusaran *money politic* yang menjadi momok di setiap gelaran Pemilu di Indonesia selain sikap apatis masyarakat.

Pelaksanaan sosialisasi materi tersebut disampaikan melalui berbagai postingan di *account* resmi media sosial relawan di *Instagram* (Relasimedan), *Facebook* (Relawan Demokrasimedan2019) dan *Twitter* (Relawan Demokrasimedan2019) maupun media sosial pribadi relawan. Penyampaian materi sosialisasi juga dilakukan saat bertemu langsung dengan masyarakat dengan menggunakan empat pola yakni : Pertama, Membuka posko informasi Pemilu. Pelaksanaannya diselenggarakan setiap hari Minggu yang berlokasi di Lapangan Merdeka Medan atau dalam acara *Car Free Day* (CFD) dan biasa juga memanfaatkan momen acara yang diselenggarakan oleh pemerintah

daerah seperti Pekan Raya Sumatera Utara (PRSU).

Dalam kegiatan tersebut Relawan Demokrasi Basis Netizen berkolaborasi dengan basis Relawan Demokrasi lain. Dalam kegiatan posko informasi biasanya diisi dengan kegiatan pembagian brosur, pengecekan Daftar Pemilih Tetap (DPT), sampai membuat *social experiment* terkait Pemilu. Selain di Lapangan Merdeka, Relawan Demokrasi Basis Netizen juga membuka posko di beberapa lingkungan kampus yang ada di Kota Medan, seperti UMSU, USU, UNIMED yang bertujuan agar membantu para mahasiswa khususnya mahasiswa rantau yang mengalami kendala dalam pengurusan A5 atau formulir pindah memilih.

Kedua, Konkow Bareng Netizen. Kegiatan sosialisasi Pemilu ini dikemas dengan tema temu ramah tamah bersama para Netizen Kota Medan yang berlokasi di beberapa cafe, seperti di Minum Kopi Medan Johor, Amora Café Medan Johor, Food Court Transmart Carefour, dan di Typo Coffe Medan Maimun. Tujuan kegiatan ini adalah sebagai sarana diskusi dan *sharing* informasi terkait pelaksanaan Pemilu 2019. Pada setiap kegiatan kongkow ini, KPU Kota Medan selalu melakukan pendampingan, dan pendampingan tersebut dinilai cukup tepat karena besarnya animo masyarakat yang hadir dan sebagiannya sangat kritis melontarkan berbagai pertanyaan seputaran Pemilu.

Ketiga, Postingan Media Sosial. Kegiatan ini memuat konten-konten informasi Pemilu dan pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan dan akan dilaksanakan di beberapa *account* media sosial Relawan Demokrasi Medan, baik berbentuk gambar, video serta *endorsement* dengan menggunakan jasa *account* ternama, hingga membuat *flyer* terkait info seputar Pemilu 2019. Keempat, Giveaway. Kegiatan ini berbentuk kuis berhadiah bagi Netizen yang memiliki pandangan atau masukan terbaik terkait

pelaksanaan Pemilu 2019 yang dilaksanakan di media sosial. Pelaksanaan kuis ini bukan hanya sekedar pemberian hadiah saja namun lebih dari itu bertujuan untuk mengukur tingkat pengetahuan dan pemahaman Netizen terkait Pemilu 2019. Jumlah pelaksanaan kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh Relawan Demokrasi Basis Netizen setiap bulan rata-rata sebanyak 3 sampai 4 kali dan seluruhnya dapat dilihat di media sosial relawan.

Perilaku Netizen dalam Sosialisasi

Perubahan perilaku yang diharapkan dari kegiatan sosialisasi Pemilu ialah pergeseran paradigma berpikir dan sikap masyarakat ke arah yang lebih positif akan konsep Pemilu dimana juga harus ditunjang oleh kesadaran memilihnya (Nurahman, Suntoro & Yanzi, 2014). Pada saat Relawan Demokrasi Basis Netizen melaksanakan kegiatan sosialisasi di masyarakat ditemukan beberapa bentuk perilaku sebagai respon dari kegiatan sosialisasi yakni sebagian masyarakat yang tergabung dalam Netizen merespon secara antusias dan aktif melalui komentar-komentar di postingan media sosial relawan, misalnya dari kaum Milenial yang didominasi para mahasiswa yang mempunyai perbedaan pandangan dibandingkan dengan kaum yang lebih tua dimana masih terdapat pertentangan antara menerima dan tidak atas pelaksanaan Pemilu 2019.

Bagi Millenial, kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh Relawan Demokrasi Basis Netizen dianggap sebagai upaya representasi perjuangan menegaskan kedaulatan rakyat dengan cara mengajak masyarakat secara persuasif untuk memilih, hal ini disokong oleh komposisi Relawan Demokrasi Basis Netizen yang seluruhnya adalah mahasiswa yang dinilai jauh dari kepentingan-kepentingan politik. Hal ini karena Millenial lebih familiar dengan media sosial sehingga mudah dan cepat mengikuti perkembangan informasi dan relatif banyak mengantongi referensi.

Sedangkan yang menolak beranggapan bahwa kegiatan sosialisasi yang dilakukan relawan merupakan kegiatan kurang kerjaan bahkan ada juga yang sampai mencemooh relawan.

Media sosial merupakan sarana interaksi Relawan Demokrasi Basis Netizen baik yang dikelola secara kolektif maupun pribadi mengalami perkembangan yang cukup baik, hal ini ditandai dengan aktifnya Netizen dalam menanggapi setiap postingan-postingan para relawan sehingga menciptakan diskusi interaktif dan bernilai positif. Namun keadaannya menjadi luar biasa paska Pemilu 2019, Netizen sebagai *follower* media sosial relawan sebagiannya menilai bahwa pelaksanaan Pemilu 2019 sangat buruk dalam beragam komentar di media sosial baik yang dikelola secara kolektif maupun pribadi, Netizen beranggapan bahwa Relawan Demokrasi Basis Netizen masih bagian dan bekerja di KPU padahal masa kerja program Relawan Demokrasi telah usai.

Relawan Demokrasi Basis Netizen merasa tidak mempunyai kapasitas untuk menjawab berbagai respon dari masyarakat sehingga terkadang menimbulkan permasalahan (cekcok) antara relawan dan Netizen. Hal ini dimaklumi sebagai konsekuensi dari setiap kompetisi Pemilu dimana pasti ada yang menang dan kalah, biasanya masyarakat yang tidak menerima calonnya kalah akan bereaksi negatif dengan berbagai bentuk seperti di media sosial yang dialami oleh Relawan Demokrasi Basis Netizen.

Interaksi dalam Sosialisasi

Dalam tulisan ini interaksi dimaknai sebagai suatu hubungan antara kelompok Relawan Demokrasi Basis Netizen dengan masyarakat internet atau Netizen dalam kegiatan sosialisasi baik itu secara individu maupun kelompok melalui media dan non media. Proses interaksi terjadi selama masa kerja Relawan Demokrasi Basis Netizen yaitu sejak Bulan Februari hingga

April 2019 yang bertujuan untuk meningkatkan angka partisipasi dan kualitas memilih Netizen pada Pemilu 2019.

Pelaksanaan sosialisasi yang dilaksanakan oleh Relawan Demokrasi Basis Netizen pada Pemilu 2019 dapat dikatakan berhasil dan sukses hal ini ditandai dengan meningkatnya kepekaan masyarakat terhadap berbagai agenda Pemilu seperti pengecekan daftar pemilih, pengurusan surat pindah memilih, mencari tahu jenis-jenis surat suara, mengikuti hasil perhitungan suara dan sebagainya. Klimaksnya dan yang paling menggembirakan adalah meningkatnya angka partisipasi masyarakat dalam memilih yang jika dilihat secara nasional mencapai 81 % atau 158.012.506 jiwa dari jumlah DPT yang mencapai 199.987.870 jiwa (Kompas, 2019).

Untuk Kota Medan, angka partisipasi pada Pemilu 2019 lalu mencapai 74,20 % atau 1.198.087 dari jumlah DPT yang mencapai 1.614.673 (KPU Kota Medan, 2020). Hal ini dapat menjadi indikasi bahwa interaksi dalam kegiatan sosialisasi Pemilu yang dilakukan Relawan Demokrasi Basis Netizen Pada Pemilu 2019 yang secara gencar dan *massive* mempunyai pengaruh yang signifikan dan membuahkan hasil memuaskan. Peningkatan angka partisipasi dan kualitas memilih masyarakat ini merupakan suatu indikasi bahwa pelaksanaan kegiatan sosialisasi Pemilu yang dilakukan relawan khususnya Relawan Demokrasi Basis Netizen telah berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan pembentukan program relawan. Suksesnya kegiatan sosialisasi tentunya tidak semudah membalikkan telapak tangan karena dibalik itu Relawan Demokrasi Basis Netizen banyak mengalami kendala dan hambatan yang selalu merintang pada saat berinteraksi baik secara *ekstern* dengan masyarakat maupun *intern* dalam kelompok relawan.

Kendala *ekstern* dalam interaksi yang dimaksud adalah : (1) Penilaian

masyarakat atas penyelenggaraan Pemilu yang penuh kecurangan dan rekayasa, hal ini tentu berpengaruh terhadap perilaku memilih masyarakat yang berpotensi menjadi Golput. (2) Pengetahuan masyarakat yang minim terhadap bentuk program Relawan Demokrasi Pemilu 2019 sehingga mengakibatkan kekeliruan pemahaman (*misunderstanding*) disaat pelaksanaan sosialisasi khususnya setelah Pemilu, dan yang terakhir adalah (3) Perilaku Netizen yang pragmatis pada saat kegiatan sosialisasi,

Dari uraian di atas pada poin pertama disimpulkan bahwa sebagian masyarakat beranggapan bahwa Pemilu 2019 adalah hal yang sia-sia atau tidak bermamfaat karena pelaksanaannya dinilai tidak jujur dan tidak adil. Pradigma ini tentu sangat memprihatinkan dan tidak mempunyai dasar yang jelas, karena jika dilihat sistem Pemilu Indonesia saat ini telah dilaksanakan dengan mekanisme yang sangat *fair* atau bebas, terbuka dan transparan, dalam artian bahwa masyarakat saat ini dapat memilih calonnya secara langsung dan bebas tanpa mekanisme partai politik dan setiap pelaksanaan tahapan Pemilu mulai dari persiapan, perhitungan dan hasil dapat dilihat relatif mudah dan cepat sebagai bagian dari upaya transparansi kinerja KPU.

Poin kedua, pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap program Relawan Demokrasi masih relatif minim hal ini cukup beralasan karena program Relawan Demokrasi baru terbentuk pada Pemilu 2014 dan Pemilu 2019 merupakan yang kali kedua pelaksanaannya, selain itu waktu operasional program ini juga relatif singkat hanya 3 bulan sehingga masyarakat merasa kebingungan bahkan memunculkan pertanyaan ketika para relawan turun di lapangan, "*Apakah benar ini penyuluh Pemilu atau Timses parpol?*". Poin ketiga, bahwa sikap sebagian masyarakat lebih cenderung pragmatis

pada pelaksanaan sosialisasi baik ketika kegiatan membuka posko atau kegiatan kongkow, Relawan Demokrasi Basis Netizen menilai sebagian masyarakat yang hadir dalam pelaksanaan sosialisasi semata-mata hanya untuk mendapatkan *souvenir* bukan untuk menyerap pengetahuan Pemilu dan demokrasi hal ini tentu sangat disayangkan karena masyarakat yang hadir dalam kegiatan tersebut sejatinya diharapkan dapat menularkan pengetahuannya kepada masyarakat yang lebih luas.

Kendala *intern* dalam interaksi yang dimaksud adalah latar belakang relawan. Relawan Demokrasi Basis Netizen mempunyai latar belakang mahasiswa dan mahasiswi aktif di kampusnya, bahkan sebagiannya tengah menyelesaikan studi akhir (tesis dan skripsi). Hal ini tentu berimplikasi pada intensitas kegiatan pertemuan baik antar sesama relawan maupun kegiatan sosialisasi di lapangan yang akhirnya membuahkan hasil yang kurang maksimal.

KESIMPULAN

Relawan Demokrasi Basis Netizen melakukan kegiatan sosialisasi Pemilu dengan menggunakan sarana media dan non media melalui postingan-postingan *account* relawan dan *account* pribadi. Ada empat pola sosialisasi Relawan Demokrasi Basis Netizen yakni : Membuka posko informasi, kongkow bareng Netizen, postingan media sosial, *giveaway*.

Beragam perilaku masyarakat atas pelaksanaan sosialisasi Pemilu terutama paska Pemilu kepada Relawan Demokrasi Basis Netizen disebabkan karena kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap program Relawan Demokrasi sehingga keberadaan relawan sempat membingungkan sebagian masyarakat.

Bagi sebagian masyarakat khususnya kaum Millenial, kegiatan sosialisasi dianggap sebagai upaya representasi perjuangan menegakkan kedaulatan rakyat hal ini disokong oleh komposisi

Relawan Demokrasi Basis Netizen yang seluruhnya adalah mahasiswa yang dinilai jauh dari kepentingan-kepentingan politik. Hal ini karena Millenial lebih familiar dengan media sosial sehingga mudah dan cepat mengikuti perkembangan informasi dan relatif banyak mengantongi referensi. Sedangkan sebagian lagi yang menolak beranggapan bahwa kegiatan sosialisasi yang dilakukan relawan merupakan kegiatan kurang kerjaan bahkan ada juga yang sampai mencemooh relawan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhiarso, D. S., Utari, P., & Hastjarjo, S. (2018). The Influence of News Construction and Netizen Response to the Hoax News in Online Media. *Jurnal The Messenger*. 10(2) : 162-173.
- Andika Syahputra. (2018). *Inilah 729 Calon Anggota DPRD Medan Pemilu 2019*. Diunduh di https://www.medanbisnisdaily.com/news/online/read/2018/09/20/51687/inilah_729_calon_anggota_dprd_medan_Pemilu_2019/ tanggal 01 Juni 2020.
- Arianto, B. (2011). Analisis Penyebab Masyarakat Tidak Memilih dalam Pemilu. *Jurnal Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan*. 1(1) : 51-60.
- Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia. (2018). *Laporan Survei Penetrasi dan Profil Prilaku Pengguna Internet Indonesia Tahun 2018*.
- Astuti, S. A. (2016). Media Sosial Sebagai Ruang Publik Antara Netiket Dan Netize. *Kanal. Jurnal Ilmu Komunikasi*. 1(2) : 203-220.
- Badan Pusat Statistik Kota Medan. (2019). *Kota Medan Dalam Angka 2019*. Published BPS Kota Medan. Katalog 1102001.1275.
- BPS. (2020). *Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas*. Diunduh di <https://www.bps.go.id/statistictable/2016/04/04/1904/penduduk-berumur-15-tahun-ke-atas-menurut-golongan-umur-dan-jenis-kegiatan-selama-seminggu-yang-lalu-2008---2019.html> tanggal 29 Mei 2020.
- Edy Suhartono. (2019). *Menakar Kadar Partisipasi Pemilih di Kota Medan dalam Menyongsong Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota tahun 2020*. Diunduh di <https://kpud-medankota.go.id/menakar-kadar-partisipasi-pemilih-di-kota-medan-dalam-menyongsong-pemilihan-walikota-dan-wakil-walikota-tahun-2020/> tanggal 24 Mei 2020.
- Fitria Chusna Farisa. (2019). *KPU Sebut Partisipasi Pemilih pada Pemilu 2019 Capai 81 Persen*. Diunduh di <https://nasional.kompas.com/read/2019/05/27/16415251/kpu-sebut-partisipasi-pemilih->

- pada-Pemilu-2019-capai-81-persen tanggal 25 Mei 2020.
- Gunawan, P., Pati, B. B., & Sampe, S. (2019). Kinerja Relawan Demokrasi Dalam Pendidikan Pemilih Pada Pemilihan Umum Legislatif Di Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2019. *Jurnal Administrasi Publik*, 5(79).
- Haryanto. (2018). *Sosialisasi Politik: Suatu Pemahaman Awal*. Yogyakarta: PolGov.
- Humas. (2019). Naik 61% Dibanding 2014, Anggaran Penyelenggaraan Pemilu 2019 Capai Rp25,59 Triliun. Diunduh di <https://setkab.go.id/naik-61-dibanding-2014-anggaran-penyelenggaraan-pemilu-2019-capai-rp2559-triliun/> tanggal 28 Mei 2020.
- Kenneth P. Langton. (1969). *Political Socialization*. London: Oxford University Press.Inc.
- Keputusan KPU RI Nomor 1944/PL.02.Kpt/01/KPU/XII/2018 *Tentang Desain Surat Suara Dan Desain Alat Bantu Coblos Bagi Pemilih Tunanetra Pada Pemilu Tahun 2019*.
- Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. (2019). *Pedoman Pelaksanaan Relawan Demokrasi Pemilu Tahun 2019*. Rumah Pintar Pemilu.
- Lindungi Hak Pilihmu -Rekapitulasi Data Pemilih – kpu.go.id
- Moleong, L.J., (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nurahman, M., Suntoro, I., & Yanzi, H. (2014). Persepsi Pemilih Pemula terhadap Atribut Sosialisasi Politik dalam Pemilu. *Jurnal Kultur Demokrasi*, 2(6).
- Prihatmoko, J.J. (2003). *Pemilu 2004 dan Konsolidasi Demokrasi*. Semarang: LP2I.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 14/PII-XI/2013. *Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden terhadap Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Rahmatunnisa, M. (2017). Mengapa Integritas Pemilu Penting? *Jurnal Bawaslu*, 3(1) : 1-11.
- Sa'ban, L. A., & Wijaya, A. A. M. (2018). Kurangnya Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Daerah Di Kabupaten Wakatobi. *Medialog. Jurnal Ilmu Komunikasi*. 1(2): 35-43.
- Samosir, R. (2015). Pengaruh Sosialisasi Media Ruang KPU Kota Pematangsiantar Terhadap Minat Kelompok Pemilu pada Pemilu Legislatif 2014. *Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*. 7(2).
- Sucipto, D. (2019). Peran Relawan Demokrasi Dalam meningkatkan Partisipasi Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 (Studi di Komisi Pemilihan Umum Kab. Banggai Laut). *Jurnal Yustisiabel*. 3(2): 213-229.
- Syahputra, I. (2017). Demokrasi Virtual dan Perang Siber di Media Sosial: Perspektif Netizen Indonesia. *Jurnal AspiKom*, 3(3): 457-475.
- Triwahyuningsih, S. (2019). Sistem Demokrasi Dalam Pemilihan Umum Secara Langsung Di Indonesia. *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(2) : 62-69
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 *Tentang Kepemudaan*.